



Buletin Parlementaria

Nomor 1065/II/VIII/2019 • Agustus 2019



4TH

MENUJU
INDONESIA
UNGGUL

Kaum Disabilitas Harus Dapat Kesetaraan Hak Kerja



9 772614 339005



3 Analisa Kerusakan, PLN
sebaiknya Koordinasi
dengan Lembaga
Kebencanaan



11 Komisi VI Dorong ITDC
Segera Persiapkan
MotoGP 2021

Kaum Disabilitas Harus Dapat Kesetaraan Hak Kerja

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, terjaminnya kesetaraan *gender* dan kaum disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama di dunia kerja perlu mendapatkan satu peneguhan. Mereka merupakan warga negara yang juga berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak di Indonesia. Terlebih, Fadli mengungkapkan, Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan untuk memberikan keleluasaan fasilitas, khususnya bagi kalangan penyandang disabilitas.

Hal itu diungkapkan Fadli, usai membuka serta menjadi *Keynote Speaker* dalam seminar “Pendekatan *Gender* dan Disabilitas Dalam Legislasi Bidang Ketenagakerjaan” yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, di Ruang Abdoel Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8). Seminar ini turut menghadirkan sejumlah narasumber, seperti Anggota DPR RI serta perwakilan Kementerian dan Lembaga.

“Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat perintah turunan dari aturan-aturan yang memberikan keleluasaan fasilitas bagi kalangan penyandang disabilitas. Ini untuk menjamin apa yang diharapkan oleh konstitusi kita, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak,” ujar Fadli.

Untuk itu, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini menjelaskan, sebagai pelaksanaan dari UU Penyandang Disabilitas tersebut, maka

perlu adanya alokasi sebesar 2 persen di dalam formasi lapangan pekerjaan bagi kaum disabilitas sebagai bentuk afirmasi atau *affirmative action*.

Lebih lanjut politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyatakan, meski rumusan pasal-pasal dari UU Penyandang Disabilitas berkaitan dengan satu keberpihakan terhadap hak dari setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan, dalam pelaksanaannya Fadli menyayangkan hal tersebut masih belum menjadi satu realitas sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara selama hampir 74 tahun Indonesia merdeka.

“Rumusan pasal-pasal di dalam konstitusi negara kita, UU Nomor 8 Tahun 2016 ini adalah rumusan pasal-pasal terkait dengan satu keberpihakan terhadap hak dari setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi belum menjadi satu

realitas kehidupan kita meskipun kita telah merdeka selama hampir 74 tahun. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), maka tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,” pungkas legislator dapil Jawa Barat V itu.

Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian (F-Golkar), Anggota Komisi IX DPR RI Nova Riyanti Yusuf (F-Demokrat), Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU) BK DPR RI Inosentius Samsul, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, dan beberapa narasumber lainnya. ■ pun,rfk/sf



Foto bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bersama Panelis seminar “Pendekatan *Gender* dan Disabilitas Dalam Legislasi Bidang Ketenagakerjaan”. Foto: Azka/HR

Analisa Kerusakan, PLN sebaiknya Koordinasi dengan Lembaga Kebencanaan

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengimbau PT. PLN (Persero) agar sebaiknya melakukan koordinasi dengan lembaga lembaga kebencanaan seperti Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menganalisa kerusakan pembangkit.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah peristiwa padamnya aliran listrik massal di wilayah Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat pada hari Minggu (4/8) itu berkaitan dengan bencana alam atau tidak.

"Itu dulu yang harus ditegaskan. Sebab apabila memang itu hubungannya dengan bencana alam, ada unsur kata yang memang tidak bisa direncanakan, tidak ada bencana alam yang persis dan benar-benar diketahui kapan akan terjadi," ucap Fahri, Senin (5/8), merespon peristiwa padamnya aliran listrik serentak yang cukup meresahkan warga yang berdomisili di Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat itu.

Bila itu alasannya, sambungnya,

PLN harus menjelaskan antisipasi kerusakan pembangkit di seluruh wilayah Indonesia akibat bencana. Sehingga padamnya listrik tidak masif yang merugikan banyak orang.

"Setelah itu bisa dijelaskan, barulah mendesain sistem listrik distribusi ke depan yang lebih otonom. Sebab kalau *black out* terjadi secara masif, karena sistemnya tidak otonom berbahaya sekali. Seharusnya pada titik bencana tertentu dia tidak menyebar sebagai sebab kematian listrik secara menyeluruh," ujarnya.

PLN juga harus menjelaskan sejujur-jujurnya mengenai pemadaman listrik yang telah dilakukan, termasuk menghitung besar kerugian konsumen. "Termasuk menjawab tentang kerugian yang dihadapi konsumen. PLN harus menjelaskan bagaimana antisipasi apabila hal ini masih terjadi. Supaya ada ketenangan bagi masyarakat, dan konsumen. Pada saat seperti ini diperlukan satu keberanian untuk korektif kalau desain kelistrikan kita ada masalah. Ini saatnya untuk kita memperbaikinya," tegasnya. ■ **dep/es**



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Foto: Andri/HR



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahaphari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistono, S.H., Rizka Arinindya, S.Sos., Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P, S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianie Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullil, Purntho Pranowo, Singih Kinanti Rimanti, Siti Nadiah, Rihan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER

Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afidhillah,
Geraldil Opie.

ANALIS MEDIA

Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya,
Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,
Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

FOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL Cetak dan Distribusi (GRATIS)

Keamanan Nduga Harus Diatasi Bersama

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong berbagai *stakeholder*, khususnya dalam hal ini Pemerintah Daerah (Pemda), aparat keamanan serta tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, untuk melakukan evaluasi terkait masalah keamanan. Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR RI itu, menyampaikan bahwa masalah keamanan di Nduga harus segera diatasi secara bersama-sama.

“Saya meminta kepada berbagai pihak di sana untuk melakukan evaluasi mengenai masalah keamanan. Sudah saatnya, masalah keamanan yang terjadi di Kabupaten Nduga diatasi secara bersama-sama dengan Pemda dan seluruh elemen masyarakat di sana,” ujar Bamsoet usai menerima kunjungan Bupati Nduga, di Ruang Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III DPR RI,

Senayan, Jakarta, Senin (5/8).

Selain itu, politisi Partai Golongan Karya ini juga meminta agar masalah keamanan yang sedang terjadi di Nduga tidak sampai menghambat jalannya pembangunan infrastruktur. Bamsoet menegaskan, hal tersebut penting untuk menjadi perhatian mengingat pembangunan infrastruktur yang sedang dikerjakan atas perintah Presiden Joko Widodo.

“Menurut saya, alangkah baiknya soal masalah keamanan tidak berdampak pada pembangunan infrastruktur yang sedang dikerjakan atas perintah Presiden Joko Widodo di Kabupaten Nduga. Pembangunan jalan maupun jembatan harus tetap berjalan dan tidak terpengaruh oleh masalah keamanan,” tandas Bamsoet.

Pada kesempatan yang sama, Bamsoet mengingatkan, tensi pengamanan dalam mengatasi

masalah keamanan di Nduga harus dikurangi agar masyarakat di wilayah tersebut tidak dalam tanda petik ketakutan terhadap situasi ketegangan yang terjadi antara pihak tentara keamanan dengan pihak separatis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

“Saya mengimbau, tensi pengamanan dalam mengatasi masalah keamanan di Kabupaten Nduga harus dikurangi agar masyarakat di wilayah tersebut tidak dalam tanda petik ketakutan terhadap situasi ketegangan yang terjadi antara pihak tentara keamanan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua,” pesan Bamsoet.

Sebelumnya, Bupati Nduga Yairus Gwijangge menyampaikan problematika yang dihadapi masyarakat di Nduga tentang masalah keamanan yang membuat masyarakat di wilayah itu tidak dapat hidup dengan tenang. Sehingga, berdampak luas dengan ditandai banyaknya masyarakat yang mengungsi ke berbagai wilayah terdekat. Terlebih lagi, yang memprihatinkan, Yairus menjelaskan hingga kini sebagian besar masyarakat yang mengosongkan 11 distrik di wilayah Nduga masih berada di hutan-hutan.

“Masyarakat di Nduga hingga kini tidak dapat hidup tenang. Bahkan, sebagian besar mereka masih berada di hutan-hutan. Mereka juga sudah mengungsi ke beberapa kabupaten tetangga terdekat karena sekitar 11 distrik di wilayah itu saat ini sudah dikosongkan. Sehingga, besar harapan kami meminta kepada Presiden melalui Ketua DPR RI untuk segera melakukan penarikan pasukan non organik dari Kabupaten Nduga,” jelas Yairus. ■ pun,rfk/sf



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menerima kunjungan Bupati Nduga. Foto: Jaka/HR

Legislator Harap Penyebaran Akses TIK Merata

Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty berharap penyebaran akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di seluruh wilayah Indonesia merata. Pasalnya, di tengah gencarnya pembangunan akses TIK di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), *blank spot* pada wilayah seluler masih ditemukan di perkotaan. Termasuk di Bali, yang notabene daerah pariwisata, konektivitas jaringan dan akses internet harus menjadi perhatian.

“Saat ini di perkotaan masih banyak masyarakatnya yang belum merdeka sinyal dan belum terakses internet,” jelas Evita dalam pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI dengan jajaran Badan Aksesibilitas dan Informasi (BAKTI) Kementerian

Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Kominfo Provinsi Bali, di Bali, Jumat (26/7).

Legislator PDI-Perjuangan ini memandang keberadaan BAKTI menjadi sebuah solusi untuk mengembangkan infrastruktur dan telekomunikasi khususnya untuk pengembangan sektor pariwisata dan UMKM di Bali. “Mereka (BAKTI) punya anggaran yang bisa dimanfaatkan, menurut saya Bali merupakan daerah destinasi yang penting. Jadi saya berharap konektivitas antar wilayah itu bisa terbangun,” ungkapnya.

Untuk itu, Evita mendorong kepada BAKTI untuk dapat mensosialisasikan program-program kerjanya, khususnya kepada Pemerintah Daerah (Pemda), agar nantinya terjalin koordinasi yang baik. “Ketika BAKTI punya program apapun itu harus tersosialisasikan. Memang kita ini sangat kreatif dan inovatif dalam menciptakan, namun lemah dalam mensosialisasikan. Menurut saya ini harus ditingkatkan,”

tandasnya.

Terakhir, politisi daerah pemilihan Jawa Tengah III ini menambahkan, di tengah program pembangunan infrastruktur dan telekomunikasi yang telah dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemda, harus juga sinkron dengan program yang telah dijalankan oleh BAKTI. “Agar ke depan tidak terjadi tumpang tindih, sehingga nantinya alokasi anggarannya bisa dialihkan ke wilayah lain yang lebih bermanfaat,” imbuh Evita. ■ *tra/sf*



Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty. Foto: Tiar/HR

Kemendagri Didorong Kelola Desa Adat Bali

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mendorong Pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri untuk mengelola desa adat di Provinsi Bali. Mardani menjelaskan, hal tersebut *urgent* untuk segera

dilakukan, mengingat di Pulau Dewata tersebut terdapat lebih dari 1.493 desa adat. Untuk itu, sambung Mardani, perlu adanya dinas khusus untuk menjaga eksistensi desa adat dan budaya Bali yang merupakan pilar pembangunan dan memajukan ekonomi masyarakat Bali.

Hal itu diungkapkan Mardani usai pertemuan Tim Kunker Komisi II DPR RI dengan Gubernur Bali I Wayan Koster, Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, perwakilan Kemendagri, perwakilan Polda, perwakilan Kejati, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, serta mitra kerja terkait seperti Sestama ANRI, Seskab, BPN, Bawaslu, Sekneg, KPU Pusat, dan Ombudsman, di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (29/7).

“Kami menemukan ide besar terkait dengan bagaimana budaya itu dijaga dan dirawat, termasuk di dalamnya itu adalah desa adat. Maka, perlu adanya urgensi yang perlu didorong segera ke Mendagri mengenai pengelolaan desa

adat di Pulau Bali ini. Mengingat, di Bali ada lebih dari 1.493 desa adat. Oleh karena itu, diperlukan adanya dinas khusus untuk menjaga eksistensi desa adat dan budaya Bali yang merupakan pilar pembangunan dan memajukan ekonomi Bali”, ujar Mardani.

Selain itu, legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali yang telah melakukan restruksisasi birokrasi terhadap 49 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi 40 OPD terkait Penyelenggaraan Pemerintah dan Reformasi Birokrasi. Pemerintah Provinsi Bali, kata Mardani, juga mengajukan OPD baru terkait Desa Pemajuan Adat dan OPD Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

“Restrukturisasi birokrasi tersebut khususnya dalam hal penataan OPD sedang di-*godok* Perdanya oleh Pemerintah Daerah. Terlebih, adat di Bali memiliki kekhasan seperti halnya di Aceh, dan di Yogyakarta,” tandas Mardani. ■ *gd/sf*



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Foto: Guntur/HR

Penegak Hukum NTT Hadapi Banyak Tantangan

Anggota Komisi III DPR RI Jacki Uly menilai, para penegak hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) seperti Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, hingga Badan Narkotika Nasional Provinsi, menghadapi banyak hambatan dan tantangan dalam menegakkan hukum di wilayah hukum NTT, khususnya

dalam memberantas penyelundupan narkoba. Tantangan itu diantaranya wilayah NTT yang sebagian besar kepulauan dan minimnya Sumber Daya Manusia (SDM).

“Ada suatu reorganisasi untuk menyusun Polres baru, tapi tidak bisa terisi (SDM) sampai sekarang. Bahkan ada tingkat Polsek, tapi untuk di Kabupaten. Semua kendala ini adalah karena masalah SDM dan sarpras yang kurang,” kata Jacki saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Kupang, NTT, Jumat (26/7). Tim Kunker Komisi III DPR RI ke NTT dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery (PDI-Perjuangan).

Politisi Partai NasDem itu menambahkan, karena wilayah NTT terdiri lebih dari 500 pulau, dan setiap Polres tidak mempunyai kapal, hal ini menjadi kendala bagi Polda NTT maupun aparat penegak hukum lainnya dalam memberantas peredaran dan

penyalahgunaan narkoba.

“Kemudian untuk mengusut kasus, dan mengirim anggota (ke pulau lain), membutuhkan biaya yang besar. Itu dialami Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian. Selain alam, memang SDM dan sarpras minim,” tandas Jacki.

Di sisi lain, karena wilayah NTT yang berbatasan dengan negara tetangga, sehingga berpotensi terhadap kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkoba, *human trafficking*, hingga pencurian ikan. Dengan kondisi wilayahnya yang kepulauan, sehingga kondisi cuaca pun tak menentu. Bahkan jika ada ombak tinggi, semakin sulit untuk mengakses pulau-pulaunya.

“Sekarang sudah dibangun struktur Polres di kabupaten, tapi wujud Polres itu tidak ada. Itu yang kita kejar, jika kita ingin kejar pelayanan kepada masyarakat,” tandas legislator dapil NTT II. ■ sf



Anggota Komisi III DPR RI Jacki Uly. Foto: Sofyan/HR

Legislator Soroti Besarnya Dana SERASI

Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Nasyit Umar menyoroti dana biaya program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) yang dikucurkan ke Kelompok Tani di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sebesar Rp 4,3 juta per hektar. Berarti, sambung Nasyit, jikalau dana tersebut dikalikan dengan areal yang akan digali seluas 200.000 hektar maka total biaya anggaran yang dibutuhkan dapat mencapai sebesar Rp 860 miliar.

Nasyit menyayangkan, jika program tersebut sampai tidak berjalan efektif maka dikhawatirkan terjadi pemborosan uang negara. Demikian diungkapkan Nasyit, usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Daerah Provinsi

Sumatera Selatan, dan jajaran instansi terkait lainnya di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Sumsel, Senin (29/7).

“Biaya program SERASI yang dikucurkan ke Kelompok Tani di Sumsel ini per 1 hektarnya adalah Rp 4,3 juta. Hal itu berarti, dengan rencana pengerjaan seluas area 200.000 hektar dikalikan Rp 4,3 juta totalnya mencapai Rp 860 miliar. Jika sampai program ini tidak berjalan efektif maka ini adalah suatu bentuk pemborosan uang negara,” tegas Nasyit.

Selain itu, legislator Fraksi Partai Demokrat ini menyatakan bahwa dana program SERASI yang disiapkan untuk membantu Kelompok Tani tersebut seharusnya berdasarkan kebutuhan lapangan dan tidak semua area harus digali. Nasyit mempertanyakan, pihak mana yang akan mengontrol dana tersebut ketika dana bantuan yang diberikan sangat besar jumlahnya sementara kebutuhan di lapangan hanya sedikit.

“Seharusnya, dana bantuan program SERASI yang disiapkan itu berdasarkan kebutuhan lapangan dan tidak semua itu harus digali. Ini kontrol saja, karena jangan sampai Kelompok Tani diperiksa. Mereka diberikan bantuan dana besar sementara dana yang digunakan di lapangan hanya sedikit tidak sesuai dengan dana yang tersedia. Lantas, siapa yang mau kontrol,” tandas legislator dapil Sulawesi Selatan II itu. ■ pun/sf



Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Nasyit Umar. Foto: Puntho/HR



Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng dan Kepala BNNP Jateng. Foto: Runi/HR

Legislator Minta Penegakan Hukum di Jateng tak Tebang Pilih

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta kepada seluruh aparat penegak hukum di Provinsi Jawa Tengah tidak tebang pilih dalam penanganan kasus apapun. Ia mencontohkan ada beberapa kasus korupsi di daerah pemilihannya, yakni Jawa Tengah X, yang menurut aduan dari masyarakat terjadi limitasi, dimana proses hukum pada kasus tersebut hanya ditangani

sampai di level tertentu.

“Saya sampaikan pengaduan masyarakat dahil saya kepada Kapolda Jawa Tengah agar kasus tersebut dapat diselidiki dan disidik lebih jauh sampai ke level yang lebih atas dan harus di tebang semua para pelaku, tidak setengah-setengah dalam penanganannya,” tegas Arsul saat pertemuan Tim Kunker Komisi III DPR RI dengan Kapolda Jateng, Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng dan

Kepala BNNP Jateng di Semarang, Jateng, Selasa (30/7).

Dalam kesempatan itu, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu pun langsung memberikan berkas bukti kasus kepada penegak hukum yang diwakili Kapolda Jateng untuk ditindaklanjuti. Kapolda Jateng Irjen Pol Rycko Amelza Danniell memastikan, pihaknya akan menindaklanjuti perkara tersebut hingga tuntas. “Saya akan tindak lanjuti perkara soal korupsi yang bapak sampaikan hingga tuntas semua,” komitmen Rycko.

Rycko memaparkan, sejumlah kasus atau perkara yang sudah ditangani Polda Jateng pada tahun 2017 terdapat 75 perkara korupsi yang menjadi target, selesai 65 perkara dengan prosentase pencapaian 87 persen. Kemudian pada tahun 2018 terdapat 90 perkara korupsi yang menjadi target, selesai 47 perkara dengan prosentase pencapaian 52 persen.

■ rni/sf

Komisi IV Minta Tahura Bung Hatta Dikelola Profesional

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono membanggakan kekayaan alam dan hutan yang dimiliki Indonesia, salah satunya di Taman Hutan Raya (Tahura) Bung Hatta di Indarung, Lubuak Kilangan, Padang, Sumatera Barat. Untuk itu, politisi Partai Golkar ini berharap kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk lebih profesional dalam pengelolaan hutan dan memberikan perhatian pada Tahura Bung Hatta.

“Sudah tepat memberikan ruang bagi investor yang profesional, yang betul-betul mengelola hutan, bukan

merusak hutan. Komisi IV selalu berusaha supaya penataan hutan ini menjadi penting dan hasil dari hutan itu yang lebih besar bukan hanya dari pengambilan kayunya, tapi menghasilkan produksi yang dikelola dengan baik,” kata Roem usai memimpin Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau Tahura Bung Hatta, Sumbar, Selasa (30/7).

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menerangkan bahwa Tahura Bung Hatta ini memberikan keberlangsungan kehidupan manusia, ekosistem, hingga flora dan fauna yang ada di dalamnya. Politisi dapil Sumbar ini menginginkan

Tahura Bung Hatta terjaga dan terpelihara dengan baik. Apabila akan dikembangkan menjadi wisata, diharapkan tidak merusak hutan, tetapi boleh mengambil manfaatnya.

“Saya berharap hutan ini bisa melindungi kita semua. Hutan di provinsi ini sangat luas, oleh karena itu kami berharap hutan dapat terpelihara terjaga dan memberi manfaat buat kehidupan. Tahura ini merupakan penyangga utama Kota Padang. Kalau Tahura ini terjadi kerusakan, dikawatirkan akan berdampak buruk pada Kota Padang dan daerah-daerah sekitarnya,” tegas Hermanto. ■ as/sf



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi IV DPR RI meninjau Tahura Bung Hatta, Sumbar. Foto: Agung/HR



Tim Kunker Reses Komisi IV DPR RI meninjau sekaligus menanam bibit pohon Pala di Dusun Taeno Atas, Desa Poka, Maluku. Foto: Ayu/HR

Legislator Dukung Maluku Kembalikan **Kejayaan Rempah**

Anggota Komisi IV DPR RI, Susi Syahdona mengapresiasi dan mendukung penuh program Benih Unggul Perkebunan (BUN) 500 yang dibentuk oleh Kementerian Pertanian (Kemtan) untuk meningkatkan produktivitas pertanian di berbagai wilayah Indonesia, termasuk sebagai upaya mengembalikan kejayaan Maluku sebagai penghasil rempah terbesar dan terbaik.

“Maluku ini yang zaman dahulunya merupakan daerah yang terkenal kaya akan rempah-rempahnya yang

berkualitas tinggi. Konon, Belanda datang ke Indonesia salah satunya karena ingin menguasai rempat di Maluku ini. Namun, belakangan komoditi unggulan Maluku itu malah semakin berkurang bahkan cenderung menghilang,” papar Susi saat meninjau sekaligus menanam bibit pohon Pala di Dusun Taeno Atas, Desa Poka, Maluku, Selasa (30/7).

Dilanjutkan politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini, program BUN 500 tidak hanya memberikan bibit atau benih unggul saja kepada para petani, namun juga pemberian alat mesin pertanian

(alsintan) yang akan memudahkan petani untuk menanam benih unggulan. Serta penyuluhan seputar cara bertanam yang baik termasuk penanganan jika hama penyakit menyerang tanamannya.

Dengan demikian, tambah Susi, produktivitas pertanian dapat meningkat yang semula hanya 0,25 persen diharapkan akan menjadi lebih dari 65 persen. Hingga pada akhirnya akan mengembalikan kejayaan Maluku sebagai penghasil rempah terbesar dan terbaik di Asia bahkan dunia. ■ ayu/es

Komisi V Dorong Percepatan Pembangunan Pelabuhan di Bali



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memimpin pertemuan Tim Kunker Reses Komisi V DPR RI dengan jajaran mitra kerja. Foto: Kiki/HR

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mendorong Pemerintah untuk segera mempercepat pembangunan empat pelabuhan untuk memajukan pariwisata Bali. Lasarus menjelaskan empat pelabuhan itu adalah Pelabuhan Sanur, Padangbai, Nusa Lembongan, dan Nusa Gede. Diharapkan, dengan adanya pelabuhan ini dapat menunjang pariwisata Bali.

“Nanti ada empat pelabuhan yang akan dibangun. Pertama di Sanur, kemudian Padangbai, Nusa Lembongan, dan Nusa Gede. Akan kita dorong untuk menunjang pariwisata di Bali,” kata Lasarus saat memimpin

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau infrastruktur dan transportasi Bali, Senin (5/8).

Legislator PDI-Perjuangan ini sangat menyayangkan sampai saat ini belum ada pelabuhan yang layak dan memadai bagi wisatawan dari luar negeri dan dalam negeri, maupun warga lokal untuk menuju Nusa Penida yang merupakan salah satu destinasi wisata dengan jumlah wisatawan yang terus meningkat dan lokasi upacara adat agama Hindu terbesar di Bali.

“Memang ada kesulitan turun naik kapal, ketika mau ke Nusa Penida demikian pula sebaliknya, karena belum ada pelabuhan penyeberangan.

Kadang-kadang kapal juga kalau air surut tidak bisa merapat ke pantai, terpaksa orang dalam kondisi basah naik ke kapal dan juga kalau kondisi ombak besar juga berbahaya,” kata Lasarus.

Lasarus melanjutkan, Komisi V DPR RI bersama mitra kerja terkait akan mencari jalan terbaik untuk mempercepat pembangunan empat pelabuhan tersebut. “Ini tentu kita harus cari jalan keluar. Karena setiap bulan, ada sekian ratus ribu orang yang menyeberang dari Bali ke Nusa Penida dan sebaliknya. Jadi empat dermaga penyeberangan ini sangat ditunggu oleh masyarakat Bali, dan dunia pariwisata Bali,” tutup Lasarus. ■ qq/sf



Pengembangan Bandara Hasanuddin Mutlak Harus Dilakukan

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Mengingat, saat ini kapasitas bandara hanya mencapai 7 juta penumpang per tahun. Sementara, *traffic* penumpang sudah mencapai 13,5 juta. Maka itu, pengembangan bandara jadi solusi mutlak yang harus dilakukan.

“Pengembangan bandara merupakan keniscayaan, apalagi membangun bandara butuh perencanaan lama dan tidak bisa cepat. Maka, ini *warning* kepada pemerintah berupaya ekonomi Indonesia tumbuh,” ungkap Azam di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Makassar, Sulsel, baru-baru ini.

Kendati penumpang sudah mencapai 13,5 juta, Azam melihat ada tren penurunan jumlah penumpang. Ia menilai penurunan bisa dikarenakan melesunya ekonomi masyarakat. “Kalau kondisi ini terus berlanjut, maka penumpang akan turun, pergerakan pesawat turun, laba juga akan turun akhirnya kontribusi pada negara juga menurun,” imbuh politisi Partai Demokrat itu.

Diketahui, di semester awal tahun 2019 terjadi penurunan baik jumlah penumpang maupun pergerakan pesawat. Berdasarkan catatan PT. Angkasa Pura I, rata-rata jumlah penumpang semester I mengalami penurunan signifikan sebesar 22,4 persen atau sebanyak 5.013.457 penumpang. Sementara pada semester pertama tahun 2018, berada di kisaran 6.462.811 penumpang.

Di sisi lain, ia mendorong pemerintah agar membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat, ditengah tren penurunan jumlah penumpang. “Yang terpenting, pemerintah perlu memikirkan bagaimana meningkatkan gairah ekonomi masyarakat kedepannya, sehingga prediksi tidak meleset dari kenyataan,” sambung politisi dapil Jawa Timur III ini. ■ *ann/sf*



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana. Foto: Anne/HR

Komisi VI Dorong ITDC Segera Persiapkan MotoGP 2021

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika telah ditetapkan sebagai *venue* untuk perhelatan MotoGP tahun 2021. Komisi VI DPR RI Iskandar D. Syaichu mendorong Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) agar dapat mempersiapkan diri dalam perhelatan MotoGP 2021 di Indonesia.

Lengkapannya, jelas Iskandar, Komisi VI DPR RI meminta kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkaitan dengan infrastruktur dalam rangka penyelesaian pembangunan KEK Mandalika dapat bersinergi lebih baik dengan ITDC. Komisi VI DPR RI juga telah memberi dukungan kepada ITDC melalui Penyertaan Model Negara (PMN) sebesar Rp 250 miliar.

“Kalau memang diperlukan alokasi

anggaran Pemerintah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kami siap memberikan bantuan,” jelas Iskandar saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin, (29/7).

Dalam pertemuan, Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer mengeluhkan kurangnya jadwal penerbangan pesawat ke Lombok. “Akan sangat membantu jika DPR dapat menyampaikan beberapa hal yang dibutuhkan dalam pembangunan kepada Pemerintah, baik dari segi infrastruktur seperti membangun akses ke Mandalika maupun memperbaiki bandara dan pelabuhan,” ungkap Abdulbar.

Menanggapi hal tersebut, Iskandar

yakin, karena MotoGP ini adalah perhelatan internasional, sehingga semua komponen yang dibutuhkan seperti infrastruktur dapat terselesaikan sebelum perhelatan MotoGP 2021 berlangsung. ■ *hnm/sf*



Anggota Komisi VI DPR RI Iskandar D. Syaichu. Foto: Hanum/HR

Proyek *Underpass* Kentungan Tak Jalankan SOP

Underpass Kentungan, di Sleman, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, satu bulan lalu mengalami ambles. Akibatnya, dua kendaraan terperosok dan terguling ke tebing jalan sedalam lebih kurang dua meter. Beruntung, tidak ada korban dalam insiden itu. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menilai kecelakaan ini terjadi akibat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tidak dijalankan dengan baik.

“Hampir tiap bulan kami selalu mendapatkan laporan terjadi kecelakaan-kecelakaan kerja. Yang menjadi perhatian kami adalah kami ingin memverifikasi kecelakaan tersebut disebabkan oleh apa. Setelah kami turun langsung ke lapangan, ternyata sebagian besar SOP tidak

dijalankan,” tegas Sigit saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Sleman, DI Yogyakarta, Senin (5/8).

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut meminta agar kepala balai jalan, kontraktor atau pekerja konstruksi itu memperhatikan betul perihal tersebut. Karena jika mereka gagal melaksanakan pekerjaan yang aman untuk lingkungannya, maka mereka harus disertifikasi ulang. Hal yang perlu disertifikasi bukan hanya perusahaannya, tetapi tenaga-tenaga ahlinya juga. Bahkan jika terjadi kecelakaan yang berat, perusahaan kontraktor tersebut bisa ditutup.

Sigit menambahkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK) merupakan landasan hukum untuk

pembangunan nasional yang ada di Indonesia. Undang-Undang ini ingin memastikan bahwa pelaksanaan konstruksi di Indonesia menjadi aman dan tidak membahayakan masyarakat baik masyarakat umum maupun masyarakat yang menjadi pekerja di proyek.

“Saya kira ini juga info kepada masyarakat, bahwa sudah ada Undang-Undang Jasa Konstruksi. Jika masyarakat menemukan terjadinya penyimpangan (dalam proyek pembangunan), maka segera laporkan saja. *Underpass* Kentungan ini sudah berjalan 58 persen dan ditargetkan selesai pada bulan Desember tahun ini. Ya ini harus dikejar siang-malam, agar tercapai kesejahteraan untuk masyarakat Yogya khususnya,” jelas Sigit. ■ cas/sf



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Sleman, DI Yogyakarta. Foto: Chasbi/HR

Renovasi Bandara Pattimura Didorong Selesai Tepat Waktu



Tim Kunker Reses Komisi VI DPR RI meninjau sarana dan prasarana Bandara Pattimura, Ambon, Maluku. Foto: Azka/HR

Anggota Komisi VI DPR RI Wahyu Sanjaya mendorong agar pembangunan renovasi Bandara Internasional Pattimura di Ambon bisa selesai dengan tepat waktu. Ditargetkan renovasi ini akan selesai pada Desember 2019. Dari hasil pantauan, masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam renovasi bandara ini, diantaranya ada keterbatasan biaya, sehingga PT. Angkasa Pura I dipaksa untuk melakukan efisiensi dalam pembiayaan.

“Akibat dari naiknya harga tiket, sehingga jumlah frekuensi penerbangan berkurang. Dan jika merenovasi

bandara lama terus disesuaikan dengan standar bandara baru memang agak sulit dibandingkan dengan harus membangun baru. Harus memiliki perhitungan yang tepat,” ungkapnya usai meninjau Bandara Internasional Pattimura bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Ambon, Maluku, Selasa (30/7).

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, Angkasa Pura I menyesalkan naiknya harga tiket pesawat berdampak terhadap jumlah frekuensi penerbangan. “Jadi kalau kita lihat, pengurangan penerbangan frekuensinya hampir sekitar 20 persen. Kalau kemarin 100 penerbangan,

sekarang tinggal 80 penerbangan. Dan penumpang pun dihadapkan pada pilihan harga tiket tinggi,” kata politisi dapil Sumatera Selatan II.

Wahyu berharap bandara ini bisa menarik wisatawan dan membuat citra Indonesia di mata internasional jadi lebih baik, sehingga kunjungan wisatawan ke Maluku turut meningkat. “Bandara juga bisa menjadi gerbang Indonesia. Kalau jati diri bandara kelihatan lebih baik dan lebih ramah, akhirnya kunjungan meningkat. Mudah-mudahan dengan diperbaikinya bandara ini, juga ada perbaikan harga tiket. Jangan sampai bandaranya bagus, tetapi penerbangannya sedikit,” pesan Wahyu. ■ azk/sf

Permintaan Turun, Aktivitas Pertambangan Harus Dijaga

Ekonomi Indonesia hingga semester pertama 2019 masih dalam tekanan. Contoh kasusnya adalah ekspor dan impor hingga Semester I tahun 2019 masih turun dan defisit neraca perdagangan juga membesar. Data menunjukkan, ekspor pada Semester I 2018 mencapai 87,86 miliar dollar AS, turun menjadi 80,32 miliar dolar AS pada Semester I 2019, atau turun 8,57 persen. Impor Semester I 2019 juga turun. Dari 89,05 miliar dolar AS pada Semester I 2018 menjadi 82,26 miliar dolar AS pada Semester I 2019, atau turun 7,63 persen.

Anggota Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad menyoroti penurunan neraca tersebut harus menjadi evaluasi bagi pemerintah, khususnya Menteri Keuangan. Ia sudah banyak mendengar dari masyarakat industri bahwa terjadi penurunan permintaan serta kesulitan import dibidang pertambangan.

“Kami di Komisi VII mendapatkan banyak laporan dari pada masyarakat industri dalam bidang pertambangan bahwa terjadi penurunan permintaan, kemudian adanya kesulitan untuk impor padahal kebutuhan sangat besar dalam negeri. Ternyata ada masalah yang Presiden katakan di media bahwa neraca minyak dan gas bumi itu negatif, maka dibatasi,” ujar Fadel saat mengikuti Kunker Reses Komisi VII DPR RI mengunjungi Depot Shell Indonesia di Kalimantan Selatan, Selasa (30/7).

Politisi Partai Golkar tersebut menyoroti bahwa kesalahan terbesar adalah neraca perdagangan Indonesia itu digabungkan antara minyak dan gas bumi dengan produk-produk lain.

“Pada waktu dulu benar pada zaman Orde Baru, zaman kita masih mengekspor minyak. Kalau sekarang kita net impor kapanpun juga, sampai kapan kita negatif terus,” ujar legislator dapil Gorontalo itu.



Anggota Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad.
Foto: Hendra/HR

Diketahui neraca perdagangan migas selalu mengalami defisit mengingat Indonesia sebagai negara net importir migas. Oleh karena itu, neraca perdagangan migas selalu mengalami defisit. Besarnya defisit tergantung dari perkembangan harga minyak mentah dunia. ■ hs/sf

Penyaluran Elpiji Bersubsidi Masih Belum Tepat Sasaran

Kelangkaan Elpiji 3 kg di pasaran masih sering terjadi. Kelangkaan tersebut bukanlah akibat dari kurangnya pasokan, melainkan lebih dikarenakan tidak tepatnya sasaran penyaluran. Elpiji bersubsidi yang seharusnya ditujukan bagi masyarakat kurang mampu, namun pada realitanya justru banyak dipakai oleh restoran mewah, hotel besar, serta orang yang mapan ekonominya.

Terkait hal itu, dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi DI Yogyakarta, Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mengatakan bahwa Komisi VII ingin mengetahui seberapa besar realisasi penjualan elpiji 3 kg bersubsidi dan juga elpiji yang non subsidi. “Kita menerima penjelasan dari instansi terkait bahwa penjualan elpiji 3

kg non subsidi di wilayah Yogyakarta hanya sekitar 20 persen,” ucap Kurtubi di Yogyakarta, Selasa (30/7).

Dikatakannya, elpiji bersubsidi tetap harus ada dan ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu. “Tetapi menjadi kurang tepat apabila elpiji bersubsidi ini yang menggunakan adalah restoran dan hotel besar, maupun keluarga kaya,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Kurtubi, Komisi VII DPR RI juga ingin mengetahui mekanismenya andaikan suatu saat subsidi elpiji itu dikurangi. “Masyarakat yang tidak mampu Harus disubsidi. Dan subsidi tersebut sejauh mungkin harus tepat sasaran. Kalau ada yang kurang tepat sasaran maka harus dicarikan cara yang sebaik-baiknya sehingga subsidi elpiji lambat laun bisa dikurangi,” tegas

politisi Fraksi Partai Nasdem itu.

Kurtubi menyampaikan, kurang lebih sebesar 70 persen elpiji yang dikonsumsi di tanah air berasal dari impor. “Dengan konsumsinya yang sudah masif di dalam negeri, akhirnya pemerintah harus mengimpor dalam jumlah yang sangat besar,” tuturnya.

■ dep/es



Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi. Foto: Devi/HR

Legislator Dorong Pemerintah Tingkatkan Sarpras Madrasah Makassar

Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang mendorong agar Pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana (Sarpras) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Makassar. Pasalnya, sejumlah siswa di sekolah tersebut berhasil meraih lomba juara tingkat nasional dan internasional di bidang matematika dan robotik, padahal kedua sekolah tersebut tidak memiliki laboratorium.

“Saya kira, karena Komisi VIII DPR RI memiliki fungsi *budgeting* (anggaran),

maka kita wajib mendorong Kementerian Agama untuk membantu sekolah itu, apalagi siswa-siswinya banyak memiliki prestasi,” kata Samsu Niang saat mengunjungi MAN 2 dan MTsN 1 Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (26/7).

Menurut legislator dapil Sulawesi Selatan II ini, penyediaan sarpras ini memang menjadi tugas pemerintah dan ia meminta agar pemerintah juga selalu memberikan pelatihan-pelatihan pengembangan guru dalam rangka mengembangkan kualitas anak didik.

“Saya kira kalau sarana dan

prasarana lengkap, guru berkualitas dan siswa juga pasti berprestasi. Terbukti Siswa MAN 2 Makassar menjadi juara matematika tingkat internasional di Jepang dan MTsN 1 Makassar juara robotik tingkat nasional,” tandasnya.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengusulkan, agar siswa-siswi yang berprestasi harus dilatih terus dan dikembangkan. Minimal mereka mendapatkan penghargaan, supaya ada motivasi kepada siswa-siswi agar terpancing untuk belajar lebih giat di masa yang akan datang. ■ jk/es



Tim Kunker Reses Komisi VIII DPR RI saat mengunjungi MAN 2 dan MTsN 1 Makassar, Sulawesi Selatan. Foto: Jaka/HR



Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI meninjau Rumah Sakit Sele Be Solu di Kota Sorong, Papua Barat. Foto: Gerald/HR

Papua Barat Tak Miliki Fasilitas Hemodialisis

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mendapati temuan tidak tersedianya fasilitas hemodialisis atau alat cuci darah khusus untuk pasien gagal ginjal di seluruh rumah sakit yang ada di Provinsi Papua Barat. Rumah Sakit Sele Be Solu di Kota Sorong, pun tak memiliki layanan itu. Akibatnya, ketika ada pasien gagal ginjal, layanan cuci darahnya harus dibawa ke Makassar atau Manado, dengan biaya yang

sangat besar sekali. Temuan ini menjadi catatan Komisi IX DPR RI.

“Itu karena tidak tersedianya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang memadai, sehingga dapat terciptanya program jaminan kesehatan yang berkualitas untuk seluruh penduduk Indonesia, termasuk fasilitas hemodialisis di sini. Menurut pengakuan dokternya, sebenarnya bukan karena alatnya, tetapi karena bangunan gedung yang tidak ada,” urai Dede usai memimpin Tim Kunker

Komisi IX DPR RI meninjau RS Sele Be Solu Sorong, Papua Barat, Jumat (26/7).

Dede menambahkan, salah satu solusinya adalah bisa menggunakan bangunan yang ada dan untuk alat cuci darah, melalui kerja sama dengan pihak ketiga untuk menyediakan alatnya. “Nah solusinya adalah bisa menggunakan bangunan yang ada, alat itu sekarang sudah bisa kerja sama melalui pihak ketiga. Kemudian juga pelatihan sudah disanggupi oleh Pemerintah Provinsi. Hanya nanti tinggal bagaimana bangunan yang ada bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

Politisi Partai Demokrat itu berharap kepada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan BPJS Kesehatan dapat terus memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik mulai dari sarana dan prasana fasilitas kesehatan untuk pasien dan peserta JKN yang memadai, sehingga dapat terciptanya Program Jaminan Kesehatan yang berkualitas untuk seluruh penduduk Indonesia. ■ *opi/sf*

Anggaran KPPPA Tahun 2020 Harus Ditinjau Ulang

Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo mengatakan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk tahun 2020 harus ditinjau ulang oleh Pemerintah dan DPR RI. Pasalnya, anggaran KPPPA untuk



Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo. Foto: Kresno/HR

tahun 2020 turun sebesar 52,06 persen dari tahun 2019 menjadi Rp 236 miliar. Menurutnya, minimal anggaran KPPPA sama besarnya dengan tahun 2019.

“(Anggaran) Ini harus ditinjau ulang oleh Pemerintah dan kami sudah meminta secara resmi kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk minimal memberikan pengajuan kepada Komisi VIII melalui Kementerian PPPA, (anggaran tahun 2020) disamakan dengan tahun ini minimal,” tegas Sara, sapaan akrabnya, saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (26/7).

Politisi Partai Gerindra itu mempertanyakan keseriusan Pemerintah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurutnya hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak dengan anggaran

sebesar itu masih sangat minim sekali. “Kita bisa melakukan apa dengan anggaran hanya Rp 2 miliar per tahun, sedangkan kebutuhan untuk UPTD dan para eselon apakah cukup,” ujar Sara seolah bertanya.

Selain itu, Sara juga menyinggung mengenai penanganan penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, perlu adanya perubahan *mindset* pada aparat penegak hukum. “Saat ini di Indonesia semua mikirnya hanya hukuman, bukan rehabilitasi dan reintegrasi. Saat ini kita sudah harus berpikir ke situ (rehabilitasi), kalau tidak lapas akan penuh dan *over capacity* terus. Bukannya mereka jadi lebih baik, tapi pada saat mereka keluar malah lebih hebat melakukan *criminal activity*-nya, karena lapas malah jadi tempat *networking* buat mereka,” ujar Saras. ■ eno/sf

Akibat Karhutla, Kanker Paru-paru Intai Masyarakat Kalteng

Anggota Komisi IX DPR RI Hang Ali Saputra Syah Pahan mengingatkan dampak dari asap hasil kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah penyakit infeksi saluran pernafasan (ISPA), bahkan dalam jangka panjang bisa menyebabkan kanker paru-paru. Ia mengaku sejak dulu dirinya sudah mengingatkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah terkait perlunya melakukan upaya secara komprehensif dan jangka panjang untuk mengatasi dampak karhutla ini. Karhutla menjadi masalah klasik yang hingga kini belum bisa diselesaikan.

“Tahun 2015 lalu misalnya juga terjadi karhutla, apakah sekarang sudah selesai dampaknya saya yakin belum. Perokok pasif saja risikonya besar apalagi asap karhutla yang pedih di mata dan sesak jika terhirup, ini sangat

berbahaya bagi kesehatan bayi hingga orang dewasa dalam jangka panjang,” ungkap Hang Ali disela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi IX ke Palangka Raya, Kalteng, Jumat (26/7). Tim Kunker Komisi IX DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dewi Asmara (F-Golkar).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebutkan jika tidak ada tindakan serius, maka 10-15 tahun ke depan risiko penyakit kanker paru-paru bisa menimpa masyarakat Kalteng akibat karhutla ini. Dirinya juga mempertanyakan langkah penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut dari Dinas Kesehatan dan instansi terkait mengenai risiko jangka panjang ini.

Pemerintah sampai saat ini menurutnya belum mengambil langkah penelitian dan pemeriksaan secara serius dan intensif. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki

kesadaran dan kemampuan finansial saja yang memeriksakan dirinya. “Bagaimana dengan orang yang tidak mengerti dan tidak memiliki biaya, di sinilah peran pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” sergah legislator dapil Kalteng itu. ■ oji/sf



Anggota Komisi IX DPR RI Hang Ali Saputra Syah Pahan. Foto: Oji/HR

Komisi IX Apresiasi Pemprov Sumut Kurangi Pengangguran

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengurangi pengangguran di wilayahnya, kendati tingkat pengangguran di Sumut masih cukup tinggi. Ia berharap dalam waktu dekat ada terobosan-terobosan baru yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran di Sumut.

“Kita berharap dalam waktu dekat ini ada terobosan-terobosan baru yang bisa dilakukan oleh pemerintah termasuk di dalam meningkatkan investasi yang bisa masuk di Sumatera Utara. Dengan demikian (investasi itu) bisa menampung tenaga kerja,” ungkap

Saleh saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Medan, Sumut, Sabtu (27/7).

Saleh memaparkan, jumlah penduduk yang merupakan angkatan kerja di Sumut sebanyak 6,365 juta jiwa. Lebih dari sepertiga penduduk berusia 15 tahun ke atas sebanyak 38,50 persen bekerja menjadi buruh/karyawan atau pegawai. Kemudian 19,80 persen berusaha sendiri, berusaha dan dibantu buruh tidak tetap sebesar 15,16 persen, serta 3,50 persen dilaporkan menjadi pengusaha dengan mempekerjakan buruh tetap/karyawan.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus terus melakukan inovasi dan pengembangan program di bidang ketenagakerjaan yang

pada akhirnya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebagai wujud implementasi program prioritas Pemerintah dalam menciptakan 10 juta lapangan kerja hingga tahun 2019,” ungkap Saleh.

Lebih lanjut, politisi PAN itu menyampaikan peran penting Balai Latihan Kerja (BLK) guna menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, mengingat tingkat pendidikan pekerja di Sumut yang masih didominasi tingkat pendidikan SMA sebanyak 33,46 persen, SMP 18,69 persen, dan SD 31,43 persen. “BLK memiliki peran penting di dalam menciptakan SDM yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan dunia kerja saat ini,” ujar Saleh. ■ skr/sf



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke BLK Kota Medan, Sumatera Utara. Foto: Singgih/HR



PPDB Sistem Zonasi Minim Panduan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menilai, perangkat untuk menunjang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi belum sepenuhnya tersedia dengan baik. Akibatnya, baik sekolah maupun orang tua murid kesulitan untuk mengikuti

sistem ini, karena minimnya panduan teknis. Untuk itu, diharapkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan panduan untuk mengikuti PPDB sistem zonasi.

“Saat PPDB (berlangsung) banyak Dinas Pendidikan dan orang tua merasa kebingungan terkait sistem zonasi. Sesungguhnya prosedur dan panduan sistem zonasi itu seperti apa. Mereka berharap pemerintah pusat mengeluarkan panduan tentang zonasi,” tutur Reni saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dengan *stakeholder* bidang pendidikan di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (26/7).

Politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menilai, PPDB sistem zonasi ini sangat baik, karena merupakan upaya untuk pemeratakan

pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. “Tujuan pemerintah sangatlah bagus ketika ingin meratakan kualitas pendidikan agar tidak hanya anak orang kaya saja bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas, anak-anak dari kalangan tidak mampu juga bisa mengakses pendidikan yang baik,” tutur Reni.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menilai indikator petunjuk teknis PPDB sistem zonasi harus segera dievaluasi. “Petunjuk teknis saat ini masih berpedoman dengan data yang ada di kelurahan. Ada juga di dalam satu kelurahan yang tidak terdapat sekolah, yang akhirnya malah membingungkan orang tua untuk mendaftarkan anaknya bersekolah. Sistem zonasi ini bagus, namun harus didukung juga dengan regulasi dan kesiapan sekolah untuk menyiapkan fasilitas dan guru yang ada,” tutur politisi Partai Gerindra itu.

■ rh/sf



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati.
Foto: Rlyan/HR

Kualitas Widyaiswara LPMP Sumsel Perlu Ditingkatkan

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) merupakan lembaga manajemen pendidikan yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menilai, fasilitas sarana dan prasarana LPMP di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup memadai. Akan tetapi, ada hal yang perlu ditingkatkan lagi, yaitu kualitas Widyaiswara (WI) di LPMP.

“Kita minta kepada Kemendikbud supaya WI dapat ditingkatkan kualitasnya, sehingga memiliki kemampuan dan kompetensi yang lebih baik, agar ke depannya mereka juga dapat memberikan pelatihan yang lebih baik kepada tenaga pendidik. Sehingga kualitas pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir ini juga dapat ditingkatkan,” katanya saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses

Komisi X DPR RI di LPMP Ogan Ilir, Sumsel, Jumat (26/7).

Selain itu, Ferdi, sapaan akrab Ferdiansyah juga menegaskan agar LPMP mampu melakukan percepatan kegiatan-kegiatan pendidikan dengan standar nasional pendidikan. “LPMP harus mampu mengakselerasi kegiatan-kegiatan pendidikan dengan memenuhi standar nasional pendidikan, yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar tata kelola, dan standar sarana dan prasarana,” tegas Ferdi.

Ferdi menjelaskan bahwa Komisi X DPR RI akan fokus kepada tiga standar nasional pendidikan tersebut. Dari hasil tinjauan lapangan Komisi X DPR ke LPMP Ogan Ilir, ditemukan bahwa masih banyak sekolah-sekolah yang membutuhkan perhatian. “Ini juga menjadi masukan yang berharga bagi Komisi X DPR, agar ke depannya dapat

dilakukan penataan ulang terhadap kebutuhan-kebutuhan, terutama sarana dan prasarana di sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Selatan, khususnya Ogan Ilir,” tandasnya.

Selain itu, imbuhan politisi Fraksi Partai Golkar itu, Komisi X DPR RI juga mendorong LPMP untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan, agar masyarakat dapat memperoleh mutu pendidikan yang baik. ■ ica/sf



Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah. Foto: Ica/HR



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI memantau langsung kondisi sekolah di Provinsi Sulawesi Utara. Foto: Andri/HR

Sekolah di Manado Butuh Perbaikan

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI memantau langsung kondisi sekolah-sekolah di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), diantaranya SMK Negeri 3 Manado dan SMA Negeri 9 Manado. Sejauh kondisi yang terpantau, perlengkapan sekolah ternyata masih belum lengkap dan beberapa ruang kelas membutuhkan perbaikan.

“Sekolah kejuruan kepariwisataan (SMKN 3 Manado) ini perlengkapan sekolahnya belum memadai dan alat praktiknya banyak yang sudah tua,” ujar Anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal saat mengikuti Tim Kunker Komisi X DPR RI mengunjungi

”

...PERBAIKAN KELAS DI SMKN 3 MANADO HARUS SEGERA DILAKUKAN, BAIK PERBAIKAN RINGAN SAMPAI BERAT. BEGITU JUGA DI SMAN 9 MANADO, DINDING RUANG KELAS BANYAK YANG RETAK.

SMKN 3 Manado dan SMAN 9 Manado, di Manado, Sulut, Sabtu (27/7).

Selain itu, ruang praktik memasak dan ruang praktik pelayanan hotel di SMKN 3 Manado terlihat kurang lengkap. Begitu juga ruang perpustakaan yang tidak representatif. “Perlengkapan alat praktik masih mengalami kekurangan yang signifikan seperti di SMKN 3. Perpustakaan juga kurang representatif. Ini jadi catatan kami,” ujar politisi PKS itu.

Mustafa menegaskan, perbaikan kelas di SMKN 3 Manado harus segera dilakukan, baik perbaikan ringan sampai berat. Begitu juga di SMAN 9 Manado, dinding ruang kelas banyak yang retak. Di sekolah ini ditemukan jumlah guru honorer jauh lebih banyak daripada guru ASN. “Ini menjadi catatan penting Komisi X DPR RI untuk ditindaklanjuti,” tandas legislator dapil Sumatera Selatan I itu.

■ man/sf



Kinerja Ekonomi Kalteng Masih Lemah

Anggota Komisi XI DPR RI Tutik Kusuma Wardhani menegaskan bahwa kinerja ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah masih sangat lemah sehingga perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan oleh tidak seimbanginya perolehan penyaluran antara kredit produktif dengan kredit konsumtif dan kredit sindikasi.

Hal ini ia sampaikan sesuai mengikuti peninjauan kelayakan Kalteng sebagai calon ibu kota, bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Palangkaraya, Kalteng, Senin (29/7). Belum lagi perusahaan *financial technology* yang mulai merambah ke daerah sangat mungkin memanfaatkan situasi seperti ini.

“Saya lihat dan perhatikan kinerja ekonomi di Kalteng masih lemah. Belum lagi nanti kemajuan *fintech* berkembang di sini. Jadi biasanya daerah-daerah yang lemah mengenai literasi dan inklusi keuangannya, dia akan mudah sekali nanti dimasuki oleh investasi ilegal,” tutur politisi Partai Demokrat tersebut.

Dalam kondisi yang lemah seperti ini, Tutik berharap sinergi dan kerja sama kerja antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dapat ditingkatkan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai literasi dan inklusi keuangan. Ia juga meminta agar laju perekonomian di Kalteng tersebut jangan sampai tertahan.

“Jangan sampai masyarakat itu terjerat oleh rentenir. Jadi itu pesan saya agar memang betul-betul dipahami nanti dan berusaha lebih meningkatkan sinergi kebijakan kerja ini. Sehingga juga laju perekonomian jangan sampai



Anggota Komisi XI DPR RI Tutik Kusuma Wardhani.
Foto: Angga/HR

tertahan. Saya dengar juga ada masalah perekonomian pertanian, perdagangan juga industri pengolahan agak menurun di triwulan ini,” tukas legislator dapil Bali tersebut. ■er/es

Pengentasan Kemiskinan di Lampung Masih Rendah

Angka pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung hanya turun satu digit dari 14 persen menjadi 13 persen. Di Pulau Sumatera, Lampung masuk peringkat tiga dari bawah soal pengentasan kemiskinan. Apalagi di tingkat nasional, Lampung masih tertinggal jauh dari provinsi-provinsi lainnya.



Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly. Foto: Husen/HR

Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly menyampaikan hal ini usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Provinsi Lampung, Senin (29/7). Perlu langkah signifikan dan menyeluruh untuk menurunkan angka kemiskinan di Lampung. Pemerintah provinsi perlu menyusun peta jalan pemberdayaan masyarakat agar kemiskinan bisa terus ditekan.

“Kita ingin ada terobosan-terobosan, sehingga pengentasan kemiskinan jadi signifikan. Jangan lagi Provinsi Lampung jadi peringkat tiga terbawah di Sumatera. Banyak potensi yang belum digali. Harusnya ada *roadmap* yang dibuat pemerintah provinsi bagaimana mengentaskan kemiskinan,” ulas legislator dapil Lampung I ini.

Politisi PKS ini berharap, semua instansi di Lampung melakukan langkah sinergi mengentaskan kemiskinan. Angka kemiskinan terlihat

dari kesempatan kerja dan daya beli masyarakatnya. “Angka kemiskinan diperoleh dari kesempatan kerja dan peningkatan daya beli. Ketika meningkat daya belinya berarti kemiskinan makin terentaskan. Ketika kesempatan kerja lebih luas, banyak pengangguran jadi pekerja maka kemiskinan bisa teratasi,” kilahnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Pemda setempat menyebut sekitar 70 persen penduduk di Lampung tinggal di pedesaan. Dan angka kemiskinannya justru ada di perkotaan. Begitu juga tingkat pengangguran terbuka di perkotaan jauh lebih tinggi daripada pedesaan. Banyak potensi ekonomi Lampung yang bisa kembali diberdayakan. Selain komoditi pertanian ada pula potensi pariwisata yang semuanya bisa menyumbang pada penurunan angka kemiskinan di Lampung. ■mh/sf

PSBI Harus Beri Pendampingan Masalah Hukum Bagi Petani

Anggota Komisi XI DPR RI Maruar Sirait mengatakan Bank Indonesia (BI) dalam menjalankan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) tidak hanya memberikan pendampingan kepada petani terkait bidang ekonomi dan teknis pertanian saja, melainkan juga harus memberikan pendampingan kepada petani yang tersangkut masalah hukum seperti konflik kepemilikan tanah.

“Bila terjadi konflik tanah, BI harus sudah memiliki pemetaan tanah mana yang masuk kategori bisa diperjuangkan atau tidak. Harus kita dorong berdasarkan kondisi ril yang

ada,” kata politisi yang akrab disapa Ara itu, saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan BI Jatim, OJK, Gapoktan Mitra Arjuna di Kota Batu, Malang, Jawa Timur (29/7).

Ara menambahkan bahwa kunjungan kerja ini harus bermakna terutama bagi petani. Ia juga meminta ke depan agar langsung dipertemuan dengan petani, dengan harapan bila ditemukan permasalahan pada tingkatan petani, bisa langsung dipetakan dan diperjuangkan.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengapresiasi BI

dengan PSBI yang membina Gapoktan Mitra Arjuna, yang sudah berhasil mengeksport kentang hingga ke Singapura. Ia berharap keberhasilan Gapoktan Mitra Arjuna dapat diikuti oleh Gapoktan lain di seluruh Indonesia.

“Dalam hal ini kita ingin bahwa sebetulnya kelompok-kelompok tani itu bisa meniru apa yang dilakukan Gapoktan Arjuna ini. Katakanlah petani-petani di Indonesia harus naik kelas. Bukan lagi sebatas menjadi petani modern yang hanya memproduksi saja, tetapi petani kita juga harus bisa mengeksport,” harap politisi dapil Jawa Timur V itu. ■ es



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan BI Jatim, OJK, Gapoktan Mitra Arjuna di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Foto: Erman/HR



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI ke Lapas Kelas IIA, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Foto: Ria/HR

Komisi III Cari Solusi Over Kapasitas Lapas

Lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia sebagian besar mengalami over kapasitas. Hal tersebut karena banyaknya narapidana berasal dari kasus narkoba. Komisi III DPR RI yang juga membidangi masalah pemasyarakatan tersebut, berupaya mencari solusi atas permasalahan over kapasitas di seluruh lapas di Indonesia.

Saat memimpin Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi III DPR RI ke Lapas Kelas IIA, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat (2/8), Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengatakan Tim Kunker ingin melihat persoalan narkoba, kelayakan makan minum serta kesehatan bagi narapidana di lapas tersebut.

"Hal-hal yang kami dapatkan dalam kunjungan ini sebagai bahan masukan

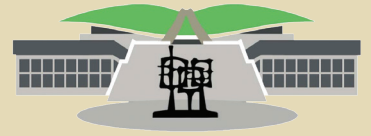
juga dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan yang sedang kami bahas dengan pemerintah, sebagai bentuk mencari solusi bagaimana mengatasi persoalan over kapasitas di lapas," ujar Desmond saat memimpin rapat dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalsel.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan tugas Kakanwil Kemenkumham dalam RUU Perasyarakatan kelak akan disempurnakan. Nanti setiap tindakan ke depan akan dibuatkan aturannya. "Kita harapkan bisa lebih teknis, agar tidak diterjemahkan berbeda-beda. Nanti kerja Kemenkumham akan lebih banyak dan bersifat proaktif," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Habib

Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan yang menjadi perhatian dari kunjungan ini adalah masih maraknya peredaran narkoba di dalam lapas. "Ini masih menjadi perhatian serius, karena baunya kecium, tapi barangnya *enggak* kelihatan. Kita harap penjaga di sini dan kepolisian bekerja sama memberantas ini," jelasnya.

Berdasarkan pantauannya saat melakukan blusukan ke dalam lapas, Habib menilai hampir semua narapidana terlihat sehat dan segar walaupun over kapasitas tidak bisa dihindari. "Mereka segar, sehat, artinya negara benar benar membiayai mereka. Namun terkait over kapasitas ini kami terus mencari solusi. Nantinya tidak semua dimasukan penjara namun ditaruh di rehabilitas, ini masih terus dibahas dalam RUU Pemasyarakatan," tutup legislator dapil Kalsel itu. ■ rmm/es



Komisi I DPR RI menerima kunjungan delegasi *House Democratic Partnership* (HDP) Kongres Amerika Serikat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8). Foto: Gerald/HR



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memimpin apel Pengamanan Dalam (Pamdal) MPR/DPR/DPD RI dalam menyambut Sidang Bersama dan Pidato Kenegaraan Presiden, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8). Foto: Eka,Agung,Runi/HR



Perpustakaan DPR RI menggelar acara Bibliobattle (mereview buku) di Ruang Perpustakaan DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8). Foto: Arief/HR

